

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tibet merupakan salah satu wilayah paling sensitif dalam politik domestik dan luar negeri Tiongkok. Konflik Tibet-Tiongkok bermula sejak Tiongkok mengirimkan pasukan militer ke Tibet pada tahun 1950 dan menandatangani "Perjanjian 17 Poin" yang kontroversial pada 1951, yang oleh pihak Tibet dianggap dipaksakan tanpa persetujuan sejati. Namun, ketika tentara Tiongkok melancarkan penindasan keras di Lhasa pada 1959, Dalai Lama kemudian melarikan diri ke India dan mendirikan pemerintahan Tibet di pengasingan (*Central Tibetan Administration/ CTA*) di Dharamsala, India yang menjadi titik awal perjuangan Tibet di panggung internasional.¹

Sejak saat itu hingga 1979, CTA menjalankan kebijakan menuntut kemerdekaan penuh Tibet. Namun seiring perubahan dinamika global dan semakin meningkatnya ketergantungan antarnegara, Dalai Lama menyadari bahwa pendekatan maksimalis tersebut tidak realistis. Ia mulai merumuskan sebuah alternatif yang lebih pragmatis sebuah pendekatan jalan tengah yang dikenal sebagai *Middle Way Approach*.²

Middle Way Approach (Umaylam) adalah kebijakan yang dikonsep oleh Dalai Lama pada 1974 sebagai upaya mendorong dialog dengan pemerintah Tiongkok dan menemukan jalan damai untuk melindungi kebudayaan dan identitas

¹ His Holiness's, "Middle Way Approach For Resolving the Issue of Tibet," *dalailama.com*, accessed June 21, 2026. <https://www.dalailama.com/messages/tibet/middle-way-approach>.

² Maya Hastuti, "Opsi Jalan Tengah Dalai Lama Dalam Penyelesaian Konflik China Tibet", (*Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 2011).

Tibet. Kebijakan ini diadopsi secara demokratis melalui serangkaian diskusi panjang oleh CTA dan rakyat Tibet. Secara filosofis, pendekatan ini berakar pada nilai-nilai Buddhis mengenai non-kekerasan dan saling ketergantungan. Jalan tengah antara status quo dan kemerdekaan secara tegas menolak kebijakan represif pemerintah Tiongkok terhadap rakyat Tibet, namun tidak menuntut pemisahan diri dari Republik Rakyat Tiongkok. Secara substansial, di bawah Middle Way, Tibet akan tetap menjadi bagian dari RRT, namun rakyat Tibet akan memiliki otonomi yang bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan konstitusi Tiongkok yang memang mengizinkan otonomi di daerah minoritas etnis.³

Dalai Lama telah secara konkret mengimplementasikannya melalui berbagai tindakan diplomatik. Pertama, Proposal Strasbourg (1988), Dalai Lama mempresentasikan proposal formal untuk negosiasi di depan Parlemen Eropa.⁴ Kedua, Rencana Perdamaian Lima Poin (1987) dan dialog berulang, sejak 1987 Dalai Lama mempresentasikan *Middle Way Approach* di berbagai forum dunia termasuk Kongres AS dan Parlemen Eropa dengan harapan kembali membawa kepemimpinan Tiongkok ke meja perundingan.⁵ Ketiga, sembilan putaran negosiasi formal (2002-2010), ini adalah bukti paling konkret dan terukur dari kesungguhan Dalai Lama menjalankan *Middle Way Approach*. Keempat, *Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People* (2008) dalam memorandum tersebut, Dalai Lama menegaskan bahwa niat Tibet bukan mengusir warga non-Tibet,

³ Central Tibetan Administration, "The Middle Way Approach : Umaylam Genuine Autonomy for the Tibetan People Briefing Note and Chronology", *Briefing Note and Chronology*, (Department of Information and International Relations Central Tibetan Administration 2022).

⁴ Hari Har Jnawali, "Tibet's Response to State Nationalism: Utilising China's Fear of Secession", (*Studies in Ethnicity and Nationalism* 23, no. 2, 2023): 158–77, <https://doi.org/10.1111/sena.12391>.

⁵ Tibet Policy Institute, "Middle Way Approach: A Dialogue Matters," *tibetpolicy.net/*, June 11, 2021, accessed June 21, 2026. <https://tibetpolicy.net/middle-way-approach-a-dialogue-matters/>.

melainkan keprihatinan atas perpindahan massal yang diinduksi dari populasi Han ke berbagai wilayah. Kelima, *Note on the Memorandum* (2010), dokumen ini mengklarifikasi dan menepis kesalahpahaman dan kekhawatiran yang telah diungkapkan pihak Tiongkok terhadap memorandum otonomi Tibet.⁶

Serangkaian tindakan diplomatis ini secara kolektif menunjukkan bahwa Dalai Lama ke-14 bukan hanya mengusulkan konsep secara abstrak, melainkan secara aktif dan berulang kali mengimplementasikan *Middle Way Approach* melalui diplomatik yang sah. Upaya diplomatik Dalai Lama tidak berjalan dalam ruang hampa. *Middle Way Approach* mendapatkan dukungan internasional termasuk Amerika Serikat, India, Inggris, Prancis, Jerman, dan Australia. Deklarasi, resolusi, dan mosi dukungan bagi *Middle Way Approach* telah disahkan di parlemen-parlemen Amerika Serikat, Uni Eropa, Prancis, Italia, Jepang, Australia, Brasil, dan Luksemburg.⁷ Di tingkat Amerika Serikat, dukungan berevolusi menjadi semakin konkret melalui legislasi. *Resolve Tibet Act*, yang disahkan pada 12 Juli 2024 oleh Presiden Biden.⁸ Di tingkat Eropa, resolusi terbaru Parlemen Eropa yang diadopsi pada sesi pleno di Strasbourg secara tegas menentang setiap upaya pemerintah Tiongkok untuk mencampuri pemilihan pemimpin spiritual Buddha Tibet, termasuk Dalai Lama.⁹

⁶ Central Tibetan Administration "A Chronology Of The Middle Way Approach," *mwa.tibet.net*, accessed June 21, 2026. <https://mwa.tibet.net/>.

⁷ Tibet Policy Institute, "Middle Way Approach: A Dialogue Matters." June 11, 2021, accessed June 21, 2026. <https://tibetpolicy.net/middle-way-approach-a-dialogue-matters/>.

⁸ Sourabh Gupta, "The Dalai Lama's Middle-Way Approach Needs Re-Adjustment," *East Asia Forum*, 2010, accessed June 21, 2026. <https://eastasiaforum.org/2010/03/08/the-dalai-lamas-middle-way-approach-and-the-need-for-re-adjustment/>.

⁹ European Parliament, "The Abduction of Tibetan Children and Forced Assimilation Practices through Chinese Boarding Schools in Tibet," *European Parliament 2023*, accessed June 21, 2026. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0479_EN.pdf.

Menariknya dukungan terhadap *Middle Way Approach* bahkan datang dari dalam komunitas intelektual Tiongkok sendiri. Termasuk Liu Xiaobo salah satu penulis surat terbuka pada 2008 yang menyatakan dukungan bagi inisiatif perdamaian Dalai Lama. Kemudian yang terakhir pengakuan nobel dan legitimasi global. Dalai Lama dianugerahi Nobel Perdamaian pada 1989 atas advokasinya terhadap solusi damai bagi isu Tibet.¹⁰

Di sinilah letak permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ini. Meskipun Dalai Lama telah secara konsisten dan dapat dibuktikan menjalankan *Middle Way Approach*, dan meskipun dukungan internasional terus menguat, respons Tiongkok justru bergerak ke arah yang berlawanan dari penolakan diplomatik menuju kebijakan asimilasi yang semakin sistematis dan agresif. Tiongkok secara konsisten menolak *Middle Way Approach* dengan tuduhan bahwa ia hanyalah “kemerdekaan terselubung”. akibat sikap keras Tiongkok tersebut, pembicaraan antara utusan Dalai Lama dan pemerintah Tiongkok terhenti sejak Januari 2010.¹¹

Jauh lebih signifikan adalah bagaimana tekanan internasional yang meningkat justru berkorelasi dengan eskalasi kebijakan asimilasi Tiongkok di Tibet. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok menempuh apa yang dikenal sebagai strategi "Sinicisasi" (*Sinicization*). Aspek signifikan dari pendekatan Xi Jinping berkisar pada isu identitas Tibet, di mana jalan menuju masalah ini

¹⁰ Central Tibetan Administration, “A Chronology Of The Middle Way Approach,” *mwa.tibet.net*, accessed June 21, 2026. <https://mwa.tibet.net/>.

¹¹ Tenzin Dorjee, “Tibetan Strategies and Chinese Counter-Strategies, 1986–2012”, (*Asian American Policy Review*, 49, 2020), 39–51.

melibatkan rekonstruksi Tibet dan rakyat Tibet sebagai bagian terintegrasi dari identitas Tiongkok.¹²

Pada awal Juli 2024, untuk pertama kalinya sejak 2010, pihak berwenang Tiongkok dilaporkan mengadakan pembicaraan langsung dengan kepemimpinan Tibet di pengasingan. Sikyong Penpa Tsering menyatakan bahwa Tiongkok-lah yang berinisiatif. Menurut pihak pengasingan, kini Tiongkok merasa berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan dengan Dalai Lama sebelum kondisi kesehatannya menurun lebih jauh.¹³ Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan internasional walaupun tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan instan tetap memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kalkulasi strategis Tiongkok,

Dari uraian di atas, terlihat sebuah paradoks yang menarik di satu sisi, Dalai Lama ke-14 telah secara konsisten dan terbukti menjalankan *Middle Way Approach* melalui instrumen-instrumen diplomatik yang sah dan diterima dunia internasional dan di sisi lain, dukungan internasional yang terus menguat justru tampak berkorelasi dengan semakin kerasnya kebijakan Sinicisasi Tiongkok di Tibet. Dan Tiongkok tetap dalam posisi konsisten menolak MWA. Namun pada saat yang sama, indikasi dimulainya kembali kontak di balik layar antara Tiongkok dan Dharamsala pada 2024 memberi sinyal bahwa tekanan internasional tidak sepenuhnya tanpa dampak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tiongkok merespons *Middle Way Approach* yang diajukan

¹² Anukriti K, "Tibet Under Pressure: China's Geopolitical Ambitions And Cultural Repression," *Bharatshakti.in*, 2024, accessed June 21, 2026. <https://bharatshakti.in/tibet-under-pressure-chinas-geopolitical-ambitions-and-cultural-repression/>.

¹³ Robert Barnett, "The Tibetan Government-in-Exile Has a New Strategy," *ChinaFile*, 2024", accessed June 21, 2026. <https://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/tibetan-government-exile-has-new-strategy>.

oleh Dalai Lama ke-14 dalam konteks dukungan internasional yang semakin menguat, dengan menggunakan pendekatan analisis politik global dan teori hubungan internasional yang relevan.

1.2 Rumusan Masalah

Middle Way Approach (MWA) yang diajukan oleh Dalai Lama ke-14 merupakan perubahan strategi politik Tibet dari tuntutan kemerdekaan menuju usulan otonomi yang tetap mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Pergeseran ini secara teoritis seharusnya membuka peluang dialog dan kompromi antara kedua pihak, terlebih MWA juga memperoleh dukungan dari berbagai aktor internasional sebagai solusi damai atas konflik Tibet. Namun, realitas menunjukkan bahwa Tiongkok tetap mempertahankan sikap penolakan yang konsisten sejak MWA pertama kali diperkenalkan hingga saat ini. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa perubahan tuntutan Tibet dan adanya dukungan internasional tidak mampu mengubah respon Tiongkok terhadap MWA. Sebagian besar penelitian terdahulu menjelaskan kebijakan Tiongkok melalui perspektif keamanan nasional, integritas teritorial, atau isu separatisme, sehingga cenderung memisahkan faktor domestik dan internasional dalam analisisnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara dinamika politik domestik Tiongkok dan faktor internasional membentuk konsistensi penolakan Tiongkok terhadap *Middle Way Approach* dengan menggunakan kerangka Two-Level Game Robert Putnam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini Adalah: Bagaimana politik global Tiongkok dalam merespon *Middle Way Approach* oleh Dalai Lama ke-14 dengan dukungan Internasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana politik global Tiongkok dalam merespon *Middle Way Approach* oleh Dalai Lama ke-14 dengan dukungan Internasional.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini Adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional terkhusus dalam bidang politik global dengan memperkaya literatur mengenai isu domestik seperti Tibet yang berkembang menjadi isu internasional karena melibatkan aktor negara dan organisasi internasional. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi rujukan dalam mengkaji hubungan antara kedaulatan negara, politik identitas, serta strategi politik global dalam perspektif teori Hubungan Internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi gambaran komprehensif mengenai dinamika politik global Tiongkok dalam merespons isu Tibet, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, diplomat, maupun praktisi hubungan internasional dalam memahami pola perilaku luar negeri Tiongkok terhadap isu kedaulatan dan intervensi

internasional. Pemahaman ini penting, terutama bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan kerja sama strategis dengan Tiongkok, agar dapat merumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam menghadapi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan konflik identitas.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi yang relevan dengan topik penelitian ini guna mendukung pengembangan studi ini. Referensi pertama merujuk pada artikel berjudul *"Recentring Tibet in India's Approach to China"* yang ditulis oleh Dr. Tenzin Lhadon, yang dimuat dalam jurnal Tibet Policy Journal tahun 2022.¹⁴ Secara umum artikel ini menganalisis kebijakan India terhadap Tibet secara historis dan kontemporer di tengah ketegangan Sino-India, dengan menyoroti kendali Tiongkok yang kuat atas Tibet dan penolakan terhadap Dalai Lama sebagai pemimpin separatis. Artikel ini menjelaskan dekret Tiongkok tahun 2007 yang mewajibkan persetujuan pemerintah untuk reinkarnasi tokoh-tokoh agama Tibet seperti Dalai Lama. Hal ini dipandang sebagai strategi inti untuk melegitimasi kekuasaan di Tibet, sementara dukungan eksternal terhadap Dalai Lama dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri. Hal ini mencerminkan penolakan Tiongkok terhadap gerakan otonomi Tibet, yang digambarkan sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional.

Dalam artikel ini dijelaskan juga India yang menjadi tuan rumah Dalai Lama ke-14 sejak 1959 dan Administrasi Tibet Pusat di Dharamsala memberikan

¹⁴ Tenzin Lhadon, "Recentring Tibet in India ' s Approach to China", (Tibet Policy Journal Vol. IX No. 2. 2022). 17–34.

dukungan internasional secara tidak langsung, memungkinkan gerakan pengasingan Tibet meskipun Tibet secara resmi diakui sebagai bagian dari Tiongkok, seperti yang ditegaskan dalam perjanjian seperti Panchsheel (1954) dan deklarasi 2003. Amerika Serikat menjadi contoh dukungan eksplisit melalui Undang-Undang Kebijakan dan Dukungan Tibet 2019, yang mendukung hak Tibet untuk memilih pemimpin agama, berbanding terbalik dengan sikap India yang hati-hati dan dikritik sebagai terlalu akomodatif terhadap Tiongkok. Tanggapan Tiongkok termasuk memandang perlindungan India terhadap pengungsi Tibet dan acara seperti “Terima Kasih India” sebagai provokasi, mendesak non-intervensi, yang menyoroti gesekan geopolitik yang diperparah oleh dukungan internasional terhadap inisiatif Dalai Lama.

Artikel ini turut membantu peneliti dalam menganalisis konteks yang lebih luas mengenai dinamika Tibet-Tiongkok. Artikel ini melengkapi proposal penelitian dengan wawasan tentang bagaimana aktor internasional mempengaruhi ketegangan ini melalui kebijakan dan dukungan. Artikel ini mampu memperluas literatur dengan menunjukkan bagaimana dukungan dari negara lain seperti AS dan India mempertahankan inisiatif Dalai Lama, secara tidak langsung menantang narasi penolakan Tiongkok. Sehingga menjadi rujukan bagi penulis agar lebih tepat dalam menguraikan dinamika isu Tibet yang berkembang menjadi isu Internasional yang tidak hanya terjadi antara Tibet dan Tiongkok.

Referensi kedua merujuk pada artikel dengan judul “*Tibet Through the Looking Glass: Reflections into the Dependencies of Tibet with China*” yang ditulis oleh Suchismita Chatterjee yang dimuat dalam International Journal of Politics and

Media tahun 2024.¹⁵ artikel ini secara umum membahas tentang hubungan kompleks Tibet dengan Tiongkok sejak invasi tahun 1950, dengan menekankan isu-isu otonomi, pelestarian budaya, pengembangan ekonomi, dan kontrol politik. Artikel ini membahas Perjanjian 17 Poin tahun 1951, yang menjanjikan otonomi Tibet sambil menegaskan kedaulatan Tiongkok, dan menyoroti bagaimana kepentingan strategis telah menyebabkan perlakuan istimewa terhadap Tibet tengah. Kebijakan Tiongkok, termasuk inisiatif seperti Kampanye “*Go West*”, bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan Tibet melalui pertumbuhan ekonomi, namun seringkali mengakibatkan eksploitasi sumber daya, ketimpangan pembangunan, dan marginalisasi budaya. Makalah ini juga mengeksplorasi protes etnis yang sedang berlangsung, ketegangan agama dan budaya, serta dampak migrasi etnis Han Tiongkok, menggambarkan status Tibet yang bergantung dan diperebutkan di dalam Tiongkok. Dinamika ini krusial untuk memahami konteks yang lebih luas dari aspirasi Tibet akan otonomi dan strategi pemerintah Tiongkok untuk mengendalikan dan mengasimilasi wilayah tersebut.

Dalam artikel ini memuat tantangan internal dan eksternal yang dihadapi Tibet, termasuk diskriminasi etnis, penindasan budaya, dan ketegangan politik. Artikel ini menyoroti bagaimana rakyat Tibet mengalami marginalisasi, pembatasan praktik keagamaan, dan krisis identitas, yang memicu ketidakstabilan dan perlawanan. Meskipun Tiongkok mempromosikan pembangunan ekonomi dan integrasi regional, upaya ini seringkali menyebabkan ketergantungan, pergeseran demografis, dan tuduhan penghapusan budaya. Artikel ini mengusulkan solusi

¹⁵ Suchismita Chatterjee and Dalai Lama, "Tibet Through the Looking Glass : Reflections into the Dependencies of Tibet With", (International Journal of Politics and Media 2024), 13–16, <https://doi.org/10.26524/ijpm.3.3>.

seperti mendepolitisasi etnisitas dan mendorong pertukaran budaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, namun perlawanan politik dan berbasis identitas tetap signifikan. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti kebijakan Tiongkok yang bertujuan mengendalikan Tibet melalui pembangunan dan asimilasi, serta perlawanan yang berakar pada pelestarian budaya dan aspirasi otonomi konteks penting untuk memahami peran potensial Pendekatan Jalan Tengah dan dukungan internasional dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Tibet.

Artikel ini membantu memberi pemahaman kepada penulis dinamika historis dan kontemporer hubungan Tibet dengan Tiongkok. Artikel ini menyoroti kompleksitas otonomi Tibet, identitas budaya, dan perlawanan, serta strategi Tiongkok dalam pengembangan ekonomi dan kontrol politik. Artikel ini membantu menganalisis bagaimana dukungan internasional dan upaya diplomatik, seperti “Pendekatan Jalan Tengah”, mungkin mengatasi isu-isu tersebut dengan menyeimbangkan kekhawatiran Tiongkok terkait kedaulatan dengan aspirasi Tibet untuk pelestarian budaya dan otonomi. Selain itu, pembahasan mengenai diskriminasi etnis, penindasan budaya, dan ketimpangan pembangunan memberikan latar belakang yang mendalam untuk mengevaluasi potensi efektivitas dan tantangan “Pendekatan Jalan Tengah” dalam mendorong penyelesaian damai dan kerja sama internasional.

Referensi ketika merujuk pada artikel dengan judul “*International Advocacy for Tibet: The Current State of Geopolitical Influences and Methods of International Action for Tibetan Human and Political Rights*” yang ditulis oleh Sophia Comiskey yang dimuat dalam jurnal SIT Digital

Collections tahun 2024.¹⁶ Artikel ini mencatat pandangan aktor advokasi bahwa tekanan eksternal “selalu membantu” dan bahwa organisasi terus beroperasi karena hal itu mungkin menghasilkan perubahan seiring waktu, meskipun hasilnya tidak segera. Pada saat yang sama, artikel ini menyoroti skeptisisme bahwa puluhan tahun upaya peningkatan kesadaran belum menghasilkan hasil konkret, dengan mencatat kekhawatiran bahwa kebijakan yang telah disahkan (misalnya, Undang-Undang Promosi Penyelesaian Sengketa Tibet-Tiongkok dan Undang-Undang Akses Timbal Balik ke Tibet) memiliki pelaksanaan yang terbatas dan sebagian besar tidak terlihat di Tibet atau dalam struktur politik Tibet, dan bahwa aktor global seringkali tetap tidak termotivasi untuk bertindak melawan Tiongkok kecuali jika hal itu menjadi kepentingan mereka sendiri (dengan Perang Dingin disebut sebagai contoh keterlibatan yang didorong oleh kepentingan).

Dalam artikel ini disajikan contoh konkret tindakan legislatif dan politik AS yang berfungsi sebagai bentuk dukungan internasional terkait Tibet dan negosiasi. Ini termasuk Undang-Undang Akses Timbal Balik ke Tibet tahun 2018, yang mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk menilai akses ke Tibet bagi warga AS dan mengizinkan pembatasan visa terhadap pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab atas pemblokiran akses tersebut. Kemudian dijelaskan juga Administrasi Tibet Pusat memposisikan dirinya sebagai perwakilan Tibet di dalam Tibet, di pemukiman, dan secara global, dan permintaan utamanya kepada komunitas internasional berfokus pada otonomi Tibet, yang dikejar melalui interaksi rutin dengan pejabat asing.

¹⁶ Sophia Comiskey, "International Advocacy for Tibet: The Current State of Geopolitical Influences and Methods of International Action for Tibetan Human and Political Rightssec173@georgetown.Edu", (School for International Training 2024).

Artikel ini peneliti jadikan sebagai landasan untuk memahami bagaimana “dukungan internasional” bagi Tibet terlihat dalam praktiknya, dan bagaimana hal itu dibentuk oleh geopolitik daripada komitmen hak asasi manusia yang murni. Artikel ini berfokus pada “keadaan saat ini dari pengaruh geopolitik dan metode tindakan internasional” terkait hak asasi manusia dan politik Tibet, dan menekankan peran organisasi advokasi internasional yang bekerja bersama (dan terkadang bergantung pada) keterlibatan pemerintah Barat melalui lobi dan perhatian kebijakan. Artikel ini memberikan pemahaman mekanisme dukungan eksternal (jaringan advokasi, lobi, inisiatif kebijakan) dan batasan dukungan tersebut ketika negara-negara mempertimbangkan tindakan terhadap Tibet melawan kepentingan strategis mereka yang melibatkan Tiongkok.

Referensi keempat merujuk pada artikel dengan judul “*Madhyama Pratipad: Nepal’s Middle Path Ambition through Non-alignment*” yang ditulis oleh Gaurav Bhattarai dan Manish Jung Pulami yang dimuat dalam jurnal *Journal of Foreign Affairs* tahun 2022.¹⁷ Dalam artikel ini secara umum berisi respons negara terhadap tekanan eksternal tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui geopolitik, tetapi juga harus dipahami melalui filosofi sejarah, budaya, dan peradaban yang membentuk perilaku kebijakan luar negeri. Bhattarai dan Pulami berargumen bahwa adopsi kebijakan non-blok oleh Nepal bukan sekadar reaksi strategis terhadap bipolaritas Perang Dingin atau persaingan Sino-India, melainkan perpanjangan dari *Madhyama Pratipad* “jalan tengah” yang berakar pada pemikiran Buddha dan mempromosikan keseimbangan, coeksistensi damai, serta menghindari aliansi

¹⁷ Gaurav Bhattarai and Manish Jung Pulami, “*Madhyama Pratipad : Nepal ’ s Middle Path Ambition through Non-Alignment*,” (*Journal of Foreign Affairs*, 2022): 153–73.

ekstrem. Melalui kasus-kasus historis seperti mediasi Nepal dalam sengketa Anglo-Tibet dan Sino-Tibet serta partisipasinya dalam Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement*, NAM), studi ini menunjukkan bagaimana praktik keseimbangan berfungsi sebagai strategi bertahan hidup dan identitas normatif bagi negara-negara kecil.

Artikel ini turut membantu penulis dalam memahami konseptual *Middle Way Approach* secara mendalam karena secara konseptual, kerangka kerja artikel ini relevan untuk menganalisis respons Tiongkok terhadap Pendekatan *Middle Way Approach* Dalai Lama ke-14 karena menyoroti bagaimana strategi “jalan tengah” atau non-konfrontatif dapat berfungsi secara bersamaan sebagai diskursus moral dan diplomasi negara yang pragmatis. Artikel ini juga membandingkan *non-alignment prinsipil* Nepal dengan *multi-alignment* kontemporer India dan penggunaan strategis Tiongkok terhadap Panchasheel dan Pemikiran Xi Jinping, menunjukkan bagaimana kekuatan besar menafsirkan ulang norma-norma damai untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Perspektif ini memberikan landasan teoretis untuk menganalisis apakah Tiongkok memandang “Jalan Tengah” Dalai Lama sebagai kerangka kerja rekonsiliasi yang sejati atau sebagai tantangan strategis terhadap kedaulatan, serta bagaimana kebijakan Tiongkok mungkin menggabungkan retorika normatif dengan pragmatisme yang didorong oleh keamanan.

Referensi yang kelima yaitu merujuk pada artikel dengan judul “*Diaspora Voices Explored: Introducing a Representative Claims Framework to Analyse the Tibetan Diaspora Network Online*” yang ditulis oleh Palmo Brunner yang dimuat

dalam jurnal WILEY tahun 2024.¹⁸ Artikel ini menekankan peran politik diaspora sebagai aktor transnasional yang bergerak melampaui batas teritorial untuk mempengaruhi politik negara asal, terutama saat menghadapi rezim otoriter seperti Tiongkok. Artikel ini memperkenalkan kerangka klaim representatif untuk menganalisis bagaimana aktor diaspora mengklaim berbicara atas nama populasi yang termarginalkan, mengubah pemahaman tentang diaspora dari kelompok homogen menjadi konstelasi aktor yang mengajukan klaim politik, moral, dan simbolis di ruang publik. Dengan perspektif jaringan, kerangka kerja ini menyoroti bagaimana situs web, organisasi, dan kelompok advokasi membentuk struktur digital yang saling terhubung, memfasilitasi lobi, mobilisasi, dan jangkauan internasional. Dalam kasus Tibet, internet menjadi arena krusial untuk membangun identitas, menyebarkan narasi, dan mengoordinasikan aktivisme, memungkinkan komunitas pengasingan untuk menghindari pembatasan negara dan berinteraksi dengan audiens global. Secara metodologis, studi ini menggunakan analisis *hyperlink* dan konten web untuk memetakan aktor, hubungan, dan strategi framing, sehingga menunjukkan bagaimana jaringan digital membentuk kontemporer representasi diaspora dan klaim-klaim yang diajukan.

Artikel ini menyajikan para aktor ini membangun legitimasi dengan mengacu pada pelestarian budaya, hak asasi manusia, demokrasi, dan non-kekerasan, menggabungkan identitas Tibet yang khas dengan norma global yang universal untuk menarik dukungan internasional. Alih-alih mengarahkan klaim utama pada negara Tiongkok, diaspora secara strategis menargetkan audiens

¹⁸ Palmo Brunner, "Diaspora Voices Explored : Introducing a Representative Claims Framework to Analyse the Tibetan Diaspora Network Online," (Wiley Online Library, 2025) <https://doi.org/10.1111/glob.12503>.

eksternal seperti organisasi internasional, pemerintah Barat, dan jaringan masyarakat sipil, mencerminkan strategi advokasi transnasional. Temuan juga mengungkapkan ketegangan terkait legitimasi dan akuntabilitas, karena aktor pengasingan berbicara atas nama Tibet di dalam Tibet yang tidak dapat secara bebas mengizinkan atau menentang representasi. Artikel ini menunjukkan bahwa politik diaspora beroperasi melalui jaringan digital, otoritas simbolis (terutama Dalai Lama), dan kerangka kerja berbasis norma, memberikan landasan analitis untuk menganalisis bagaimana Tiongkok merespons inisiatif yang didukung secara internasional seperti Pendekatan Jalan Tengah.

Artikel ini berkontribusi memberi pemahaman mendalam mengenai pihak Tibet sebagai aktor politik yang aktif, bukan korban pasif. Brunner menunjukkan bahwa diaspora Tibet beroperasi sebagai jaringan advokasi transnasional yang mengajukan “klaim representatif” atas nama orang Tibet di dalam Tibet dan secara strategis memanfaatkan platform digital, NGO, dan norma global (HAM, demokrasi, non-kekerasan) untuk memperoleh legitimasi dan simpati internasional. Hal ini sangat relevan dengan penelitian karena *Middle Way Approach* (MWA) bergantung tepatnya pada mobilisasi global dan kerangka moral. Dengan kata lain, artikel ini membantu menjelaskan bagaimana dukungan internasional untuk Dalai Lama diproduksi dan diorganisir, bukan sekadar diasumsikan. Artikel ini menyediakan konsep-konsep seperti jaringan diaspora, klaim, legitimasi, dan strategi kerangka, yang dapat digunakan untuk menganalisis mengapa Tiongkok memandang *Middle Way Approach* sebagai tantangan politik dibanding sekadar proposal agama atau budaya.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Two-Level Game Theory merupakan salah satu pendekatan dalam studi Hubungan Internasional dan Analisis Kebijakan Luar Negeri yang dikembangkan oleh Robert D. Putnam melalui artikelnya yang berjudul *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games* pada tahun 1988. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan tradisional dalam Hubungan Internasional yang cenderung memisahkan antara faktor domestik dan faktor internasional dalam menjelaskan perilaku negara. Sebelum kemunculan teori ini, banyak kajian hubungan internasional yang berfokus pada sistem internasional sebagai faktor utama yang menentukan perilaku negara, sementara kajian politik domestik lebih menekankan pada proses internal negara tanpa memperhatikan pengaruh lingkungan internasional.¹⁹

Putnam berpendapat bahwa pemisahan antara faktor domestik dan internasional tidak mampu menjelaskan secara utuh bagaimana suatu negara mengambil keputusan, terutama dalam isu-isu yang melibatkan interaksi antara kepentingan dalam negeri dan tekanan dari lingkungan internasional. Oleh karena itu, ia mengembangkan konsep Two-Level Game yang memandang proses pengambilan kebijakan sebagai suatu permainan yang berlangsung secara simultan pada dua arena politik yang berbeda tetapi saling berhubungan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kebijakan luar negeri Tiongkok dalam merespons *Middle Way Approach*, tetapi juga menganalisis bagaimana isu Tibet berkembang dari persoalan

¹⁹ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games", no. 3 , (The MIT Press 1988): 427–60.

domestik menjadi isu yang melibatkan interaksi berbagai aktor di tingkat internasional. Dalam penelitian ini, respons Tiongkok dipengaruhi oleh hubungan antara dinamika politik domestik dengan tekanan dan dukungan dari aktor-aktor internasional, sehingga fenomena yang dianalisis berada dalam ruang lingkup politik global, bukan sekadar hubungan bilateral antara Tiongkok dan Tibet.

Menurut Putnam, para pembuat kebijakan, khususnya kepala pemerintahan atau negosiator negara, berada dalam posisi yang harus memainkan dua permainan sekaligus. Pada satu sisi, mereka berinteraksi dengan aktor-aktor internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Pada sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa hasil dari interaksi internasional tersebut dapat diterima oleh berbagai aktor domestik yang memiliki pengaruh terhadap proses politik di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari interaksi antara dua tingkat politik yang berbeda, yaitu tingkat internasional dan tingkat domestik.

Konsep dasar Two-Level Game didasarkan pada asumsi bahwa negara bukanlah aktor tunggal (*unitary actor*) yang selalu bertindak secara rasional dan homogen. Sebaliknya, negara dipandang sebagai arena yang terdiri atas berbagai kelompok kepentingan, institusi politik, birokrasi, elite pemerintahan, partai politik, serta aktor-aktor lain yang memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan negara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi juga oleh dinamika politik yang terjadi di dalam negeri.

Dalam melakukan analisis menggunakan *Two-Level Game Theory* ada beberapa istilah yang perlu diketahui dan akan menjadi konsep yang ada dalam proses analisis, yaitu:

1. Konsep *Overlap*

Dalam teori *Two-Level Game*, Robert Putnam menjelaskan bahwa hasil suatu negosiasi internasional tidak hanya bergantung pada kemampuan para negosiator mencapai kesepakatan di tingkat internasional (Level I), tetapi juga pada kemampuan mereka memperoleh persetujuan dari aktor-aktor domestik (Level II). Untuk menjelaskan hubungan tersebut, Putnam memperkenalkan konsep *Win-set*, yaitu himpunan seluruh alternatif kesepakatan internasional yang masih dapat diterima oleh konstituen domestik suatu negara. Semakin besar *Win-set*, semakin luas ruang kompromi yang dimiliki negara tersebut dalam proses negosiasi internasional. Sebaliknya, semakin kecil *Win-set*, semakin terbatas pula pilihan kebijakan yang dapat diterima di tingkat domestik.

Keberhasilan suatu negosiasi sangat bergantung pada adanya *Overlap*, yaitu irisan antara *Win-set* masing-masing pihak yang bernegosiasi. *Overlap* menunjukkan bahwa terdapat setidaknya satu alternatif kebijakan yang masih dapat diterima oleh seluruh pihak sekaligus memperoleh legitimasi domestik di masing-masing negara. Dengan demikian, semakin besar irisan *Win-set*, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan internasional. Sebaliknya, apabila irisan tersebut semakin kecil, maka ruang kompromi juga semakin terbatas sehingga negosiasi menjadi lebih sulit untuk menghasilkan kesepakatan.

2. Konsep *Zero Overlap*

Konsep *Zero Overlap* merupakan kondisi ketika tidak terdapat irisan sama sekali antara *Win-set* kedua pihak yang bernegosiasi. Dalam situasi ini, tidak ada satu pun alternatif kesepakatan yang dapat diterima sekaligus diratifikasi oleh aktor

domestik masing-masing pihak, sehingga negosiasi hampir pasti mengalami kebuntuan. Putnam menjelaskan bahwa semakin kecil ukuran *Win-set* masing-masing negara, semakin besar kemungkinan terjadinya *Zero Overlap*, yang menyebabkan negosiasi tidak mampu menghasilkan kesepakatan internasional.

3. Konsep *Schelling Conjecture*

Robert Putnam mengadopsi pemikiran Thomas Schelling mengenai hubungan antara politik domestik dan posisi tawar internasional yang dikenal sebagai *Schelling Conjecture*. Konsep ini menjelaskan bahwa keterbatasan seorang negosiator dalam memperoleh dukungan domestik tidak selalu menjadi kelemahan, melainkan dapat menjadi sumber kekuatan dalam proses negosiasi internasional. Negosiator dapat menyampaikan bahwa ruang komprominya sangat terbatas karena setiap bentuk konsesi berpotensi ditolak oleh aktor domestik. Dengan demikian, keterbatasan domestik dapat digunakan sebagai alasan yang kredibel untuk mempertahankan posisi negosiasi di tingkat internasional.

4. Konsep *Involuntary defection*

Putnam juga memperkenalkan konsep *involuntary defection*, yaitu kondisi ketika seorang negosiator gagal memenuhi atau melaksanakan hasil kesepakatan internasional bukan karena tidak memiliki kemauan (*voluntary defection*), tetapi karena kesepakatan tersebut tidak memperoleh dukungan atau ratifikasi dari aktor domestik. Dengan kata lain, kegagalan tersebut disebabkan oleh keterbatasan politik domestik yang berada di luar kendali negosiator. Putnam menegaskan bahwa semakin sempit *Win-set* suatu negara, semakin besar risiko terjadinya *involuntary*

defection karena semakin kecil kemungkinan suatu kesepakatan dapat diterima oleh aktor domestik.²⁰

1.7.1 Komponen Analisis

Dalam Two-Level Game Theory ada 3 beberapa komponen kunci yang akan penulis jadikan alat analisis penelitian ini yaitu:

1. Level I (International Level)

Level I merupakan arena internasional tempat berlangsungnya negosiasi, interaksi, maupun hubungan antara suatu negara dengan aktor eksternal lainnya. Pada level ini, pemerintah berhadapan dengan berbagai tuntutan, tekanan, peluang, maupun insentif yang berasal dari lingkungan internasional. Aktor-aktor yang terlibat dalam Level I dapat berupa negara lain, organisasi internasional, organisasi regional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah internasional, jaringan advokasi transnasional, maupun berbagai aktor global lainnya.

Pada level ini, pemerintah berupaya mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Dalam proses tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan posisi negara lain, dinamika sistem internasional, serta berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu, Level I sering dipahami sebagai arena diplomasi dan negosiasi internasional. Putnam menekankan bahwa hasil yang diperoleh pada Level I tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil interaksi antarnegara semata. Keberhasilan suatu negara dalam arena internasional sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik

²⁰ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games", no. 3 , (The MIT Press 1988): 427–60.

yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, posisi yang dibawa oleh suatu negara dalam negosiasi internasional sering kali merupakan refleksi dari kepentingan dan tekanan yang berasal dari dalam negeri.

Dimensi level I yaitu aktor internasional, bentuk interaksi internasional dan pengaruh internasional. Aktor internasional mengacu pada berbagai pihak yang berada di luar negara dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan suatu negara melalui hubungan internasional. Aktor tersebut tidak hanya terdiri atas negara lain, tetapi juga organisasi internasional, organisasi regional, organisasi non-pemerintah (NGO), jaringan advokasi transnasional, serta aktor global lainnya yang mampu memengaruhi proses pengambilan kebijakan suatu negara.

Interaksi internasional menjelaskan bagaimana hubungan antara negara dengan aktor-aktor internasional berlangsung dalam arena Level I. Interaksi tersebut dapat diwujudkan melalui diplomasi, negosiasi, kerja sama, dialog, pemberian dukungan, maupun tekanan politik. Beragam bentuk interaksi ini menjadi mekanisme yang digunakan oleh aktor internasional untuk menyampaikan kepentingan, memengaruhi sikap negara, serta mendorong tercapainya tujuan tertentu dalam hubungan internasional. Pengaruh internasional mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh aktor dan interaksi internasional terhadap proses pengambilan kebijakan suatu negara. Dalam Two-Level Game Theory, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan domestik, tetapi juga harus memperhitungkan konsekuensi yang muncul dari lingkungan internasional. Pengaruh tersebut dapat berupa tekanan diplomatik, pembentukan opini publik

global, norma internasional, maupun dukungan politik yang berpotensi memengaruhi posisi dan respons suatu negara terhadap isu tertentu.²¹

2. Level II (Domestic Level)

Level II merupakan arena domestik yang mencakup seluruh proses politik internal suatu negara. Pada level ini, pemerintah harus berhadapan dengan berbagai aktor domestik yang memiliki kemampuan untuk mendukung ataupun menolak suatu kebijakan. Aktor domestik tersebut dapat berupa parlemen, partai politik, birokrasi, kelompok kepentingan, media, masyarakat sipil, elite politik, maupun kelompok masyarakat yang terdampak oleh suatu kebijakan.

Dalam perspektif Putnam, suatu kesepakatan atau kebijakan yang dihasilkan pada Level I tidak akan dapat dijalankan apabila tidak memperoleh penerimaan dari aktor-aktor yang berada pada Level II. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat bagaimana reaksi domestik terhadap berbagai keputusan yang diambil dalam arena internasional.

Level II menjadi penting karena sering kali terdapat perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok domestik. Sebagian kelompok mungkin mendukung suatu kebijakan karena dianggap memberikan manfaat, sementara kelompok lain mungkin menolaknya karena dianggap merugikan kepentingan mereka. Situasi ini menyebabkan pemerintah harus melakukan proses penyesuaian dan kompromi untuk memperoleh dukungan yang cukup terhadap suatu kebijakan. Dimensi level II ini meliputi aktor domestik, kepentingan domestik dan struktur politik domestik.

²¹ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games", no. 3 , (The MIT Press 1988): 427–60. Robert D. Putnam. Robert D. Putnam.

Aktor domestik mengacu pada berbagai pihak di dalam suatu negara yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan. Dalam Two-Level Game Theory, aktor domestik merupakan pihak yang berada pada Level II dan berperan dalam menerima, mendukung, maupun menolak suatu kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Aktor tersebut dapat meliputi pemerintah, parlemen, partai politik, birokrasi, kelompok kepentingan, media, maupun masyarakat sipil yang memiliki kepentingan terhadap isu yang dihadapi negara.²²

Kepentingan domestik mengacu pada berbagai tujuan dan prioritas nasional yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan domestik yang dianggap strategis. Kepentingan tersebut dapat berupa stabilitas politik, keamanan nasional, pertumbuhan ekonomi, integritas wilayah, maupun legitimasi pemerintah, yang secara keseluruhan menjadi faktor utama dalam menentukan sikap negara. Struktur politik domestik menjelaskan kondisi serta mekanisme politik di dalam suatu negara yang memengaruhi proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur politik domestik menentukan bagaimana suatu kebijakan memperoleh dukungan atau penolakan dari aktor-aktor domestik. Struktur ini mencakup sistem pemerintahan, distribusi kekuasaan politik, mekanisme pengambilan keputusan, serta aturan atau institusi yang mengatur proses perumusan dan implementasi kebijakan negara.

²² Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games", no. 3 , (The MIT Press 1988): 427–60. Robert D. Putnam.

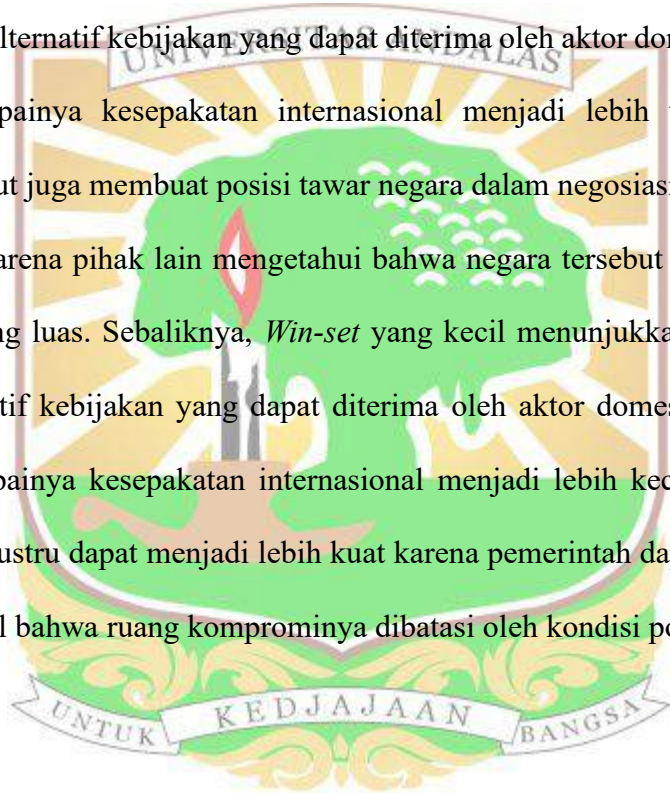
3. Konsep Win- Set

Dalam Two-Level Game Theory, *Win-set* merupakan konsep yang menjelaskan himpunan atau sekumpulan kemungkinan hasil negosiasi pada Level I (international) yang masih dapat memperoleh persetujuan atau ratifikasi dari aktor-aktor pada Level II (domestik). Dengan kata lain, suatu kesepakatan internasional hanya dapat diwujudkan apabila isi kesepakatan tersebut berada dalam batas penerimaan para aktor domestik yang memiliki kewenangan atau pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, *Win-set* menjadi penghubung antara dinamika internasional dan politik domestik dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan atau kesepakatan internasional. *Win-set* merujuk pada sekumpulan alternatif kebijakan atau kesepakatan yang masih dapat diterima oleh aktor-aktor domestik pada Level II. Dengan kata lain, *Win-set* menunjukkan batas ruang kompromi yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan pemikiran Putnam, konsep *Win-set* tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan kemungkinan tercapainya suatu kesepakatan internasional, tetapi juga menjelaskan hubungan antara tekanan internasional dan batasan domestik dalam proses pengambilan kebijakan. Semakin besar irisan (*Overlap*) *Win-set* antarnegara, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan. Sebaliknya, apabila *Win-set* para pihak tidak saling beririsan, maka negosiasi berpotensi mengalami kebuntuan (*deadlock*) karena tidak terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Konsep *Win-set* digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu negara memiliki tingkat fleksibilitas yang berbeda dalam merespons tuntutan internasional. Negara yang memiliki *Win-set* besar

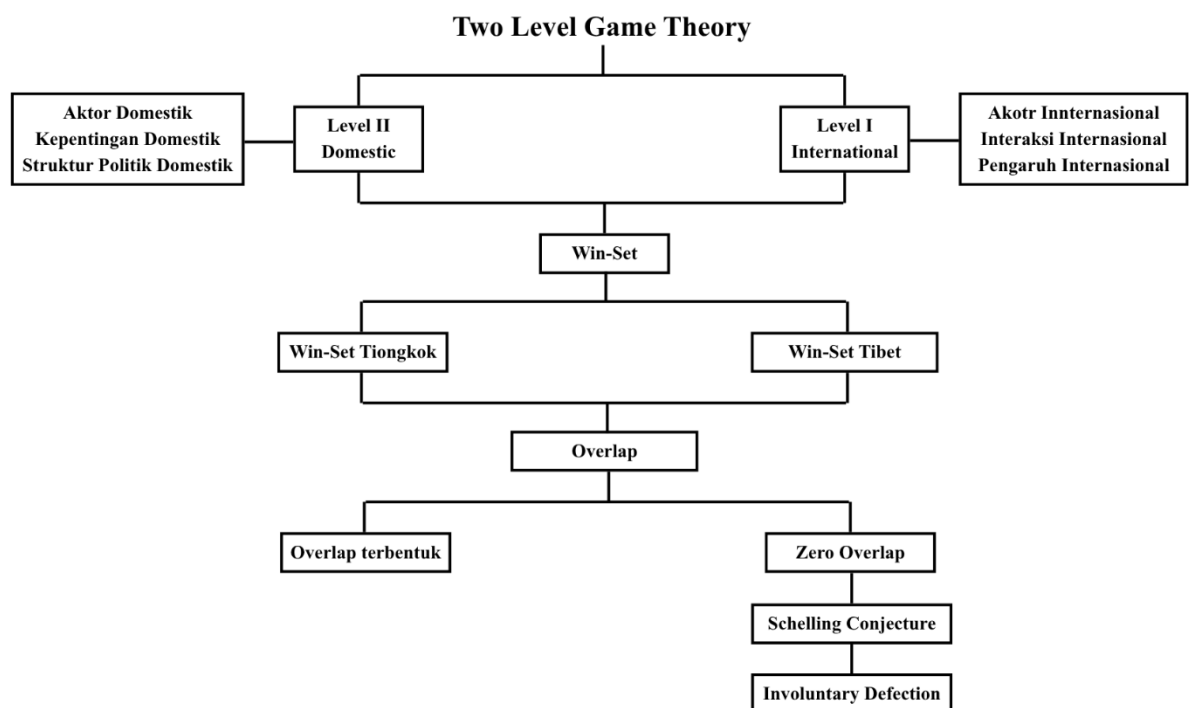
cenderung memiliki ruang kompromi yang lebih luas karena terdapat lebih banyak alternatif kebijakan yang dapat diterima oleh aktor domestik. Sebaliknya, negara yang memiliki *Win-set* kecil memiliki ruang kompromi yang terbatas karena hanya sedikit alternatif kebijakan yang dapat diterima oleh aktor domestik.²³

Menurut Putnam, ukuran (size) *Win-set* memiliki implikasi penting terhadap proses negosiasi internasional. Negara yang memiliki *Win-set* besar mempunyai lebih banyak alternatif kebijakan yang dapat diterima oleh aktor domestik sehingga peluang tercapainya kesepakatan internasional menjadi lebih tinggi. Namun, kondisi tersebut juga membuat posisi tawar negara dalam negosiasi menjadi relatif lebih lemah karena pihak lain mengetahui bahwa negara tersebut memiliki ruang kompromi yang luas. Sebaliknya, *Win-set* yang kecil menunjukkan bahwa hanya sedikit alternatif kebijakan yang dapat diterima oleh aktor domestik. Akibatnya, peluang tercapainya kesepakatan internasional menjadi lebih kecil, tetapi posisi tawar negara justru dapat menjadi lebih kuat karena pemerintah dapat menyatakan secara kredibel bahwa ruang komprominya dibatasi oleh kondisi politik domestik.



²³ Robert D. Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics : The Logic of Two-Level Games", no. 3 , (The MIT Press 1988): 427–60. Robert D. Putnam.

Ukuran *Win-set* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, distribusi preferensi di antara kelompok-kelompok domestik. Semakin besar perbedaan kepentingan di antara kelompok domestik, semakin sulit pemerintah menemukan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, struktur institusi politik yang menentukan mekanisme ratifikasi atau penerimaan suatu kebijakan. Ketiga, strategi yang digunakan oleh para pemimpin politik dalam membangun dukungan



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep.

Sumber: Diolah oleh penulis dari pemikiran Putnam

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian teknik pengumpulan data yang dijalankan dengan instrumen-instrumen spesifik yang memungkinkan peneliti untuk memahami objek penelitian.²⁴ Metode penelitian membantu mengarahkan peneliti diawali dengan suatu pemikiran yang berbentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁵

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata melalui penafsiran mendalam terhadap data non-numerik, seperti teks, dokumen, wacana, dan narasi dari berbagai sumber.²⁶ Penelitian kualitatif dalam studi HI memungkinkan peneliti untuk mendalami peristiwa, tempat, organisasi, atau tokoh tertentu secara lebih detail dan kontekstual dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.²⁷ Dilakukan dengan pendekatan studi kasus karena kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukannya penelitian studi kasus oleh karena itu tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian.²⁸

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, "Social Research Methods" *Oxford*, (Oxford University Press 2016) : 46–47.

²⁵ Dimas Assyakurrohim, et al. , "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif" (Penerbit Kbm Indonesia, 2023), Accessed June 21, 2026. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

²⁶ M.Pd.I Dr. Tri Wahyudi Ramdhan, "Metode Penelitian Kualitatif," (jurnal.staidhi 2025).

²⁷ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan " (semanticscholar 2024): 198–211.

²⁸ Dimas Assyakurrohim, dkk, "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif" (Penerbit Kbm Indonesia, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis politik global yang dilakukan Tiongkok dalam merespon *Middle Way Approach* yang ditawarkan oleh Dalai Lama ke-14 di level global. Dalam hal ini menyoroti analisis pada aktor-aktor yang terlibat secara signifikan dalam isu Tibet ini yaitu Tiongkok, Dalai Lama dan rakyat Tibet, organisasi internasional beberapa negara yang ikut aktif menyuarakan dukungannya terhadap isu Tibet dan Tiongkok.

1.8.3 Unit Analisis, Tingkat Analisis, dan Unit Eksplanasi

Unit analisis adalah entitas yang menjadi fokus variabel analisis dalam penelitian, dapat berupa individu, kelompok, organisasi, negara, atau objek lain yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.²⁹ Tingkat analisis (*level of analysis*) merujuk pada tingkatan atau level di mana konsep atau variabel yang diteliti diaplikasikan dan dianalisis dalam sebuah penelitian.³⁰ Unit Eksplanasi adalah entitas yang datanya dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.³¹

Unit analisis penelitian ini adalah Tiongkok dan Tibet terkhusus Dalai Lama. Unit ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada tindakan kedua pihak dan respon atas tindakan tersebut baik dengan adanya pengaruh internal dan eksternal. Tingkat analisis berada di level negara dengan menyorot politik global Tiongkok terhadap *Middle Way Approach* oleh Dalai Lama ke-14. Unit eksplanasi penelitian

²⁹ Christopher Lamont, "Research Methods in International Relations," (London : SAGE Publications, 2022): 123.

³⁰ Christopher Lamont, "Research Methods in International Relations," (London : SAGE Publications, 2022): 123.

³¹ Christopher Lamont, "Research Methods in International Relations," (London : SAGE Publications, 2022): 123.

ini adalah perilaku kebijakan luar negeri / strategi politik global Tiongkok dalam merespon *Middle Way Approach*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data- data sekunder. melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi pemerintah Tiongkok, white paper kebijakan, pidato politik, laporan organisasi internasional, jurnal ilmiah, buku, serta publikasi media kredibel yang relevan dengan isu Tibet. Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan negara, sehingga lebih menekankan pada telaah dokumen dan literatur dibandingkan pengumpulan data lapangan.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, analisis data disesuaikan dengan pendekatan *global politics* yang menekankan interaksi antara aktor negara, non-negara, serta dinamika kebijakan lintas level domestik dan internasional. Analisis dilakukan menggunakan *Interactive Model of Analysis* Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan.³²

1. Reduksi Data

Merupakan tahap awal yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian mengenai respons politik global Tiongkok terhadap *Middle Way Approach*, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dokumen-dokumen yang relevan, seperti

³² Johnny Saldana Matthew B. Miles, "A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook", (SAGE Publications 2014).

pernyataan resmi pemerintah Tiongkok, pidato Dalai Lama, laporan organisasi internasional, serta pemberitaan media global. Data kemudian dikodekan dan dikelompokkan ke dalam kategori, misalnya isu keamanan, kedaulatan, diplomasi internasional, dan hak asasi manusia.

2. Penyajian Data

Proses mengorganisasi dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan tertentu.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Proses menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis, tingkat analisis, unit eksplanasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab II: SEJARAH *MIDDLE WAY APPROACH* DALAM DINAMIKA KONFLIK TIONGKOK- TIBET

Bab ini menguraikan sejarah bagaimana gerakan kemerdekaan Tibet hingga pada akhirnya Dalai Lama ke-14 mengajukan *Middle Way Approach* sebagai jalan Tengah yang dianggap lebih realistis.

Bab III: DUKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP *MIDDLE WAY APPROACH*

Bab ini menyajikan tentang apa saja dukungan pihak eksternal yaitu meliputi negara dan aktor lain (level internasional) yang didapatkan oleh Dalai Lama untuk menguatkan posisi *Middle Way Approach* sebagai langkah yang baik dalam menyelesaikan konflik Tiongkok-Tibet.

Bab IV: ANALISIS POLITIK GLOBAL TIONGKOK DALAM MERESPON *MIDDLE WAY APPROACH* OLEH DALAI LAMA KE-14 DENGAN DUKUNGAN INTERNASIONAL

Bab ini menyajikan analisis mendalam terkait isu Tiongkok-Tibet menggunakan konsep yang dipakai penulis.

Bab V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitim, jawaban atas pertanyaan penelitian, kontribusi penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.